

**PEDOMAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan untuk memenuhi mandat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, maka perlu disusun RKP.

RKP memuat arah kebijakan nasional tahunan yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Penyusunan RKP Tahun 2021 dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Untuk memberi acuan dalam penyusunan RKP Tahun 2021, perlu disusun Pedoman bagi Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Substansi, Tim Baca, Penanggung Jawab Koordinasi Pusat-Daerah dan Pusat-Pusat, dan Tim Dukungan Administrasi penyusunan RKP Tahun 2021 maupun semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKP Tahun 2021. Secara garis besar Pedoman Penyusunan RKP Tahun 2021 mencakup: (1) Struktur Pelaksana Penyusunan RKP Tahun 2021, (2) Mekanisme Kerja, dan (3) Tata Cara Penulisan.

Diharapkan Pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKP Tahun 2021 sehingga memberikan hasil suatu dokumen RKP dengan kualitas yang semakin baik. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam penyusunan Pedoman tentang Penyusunan RKP Tahun 2021.

Jakarta, Februari 2020

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas



Himawan Hariyoga

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Ruang Lingkup .....	3
1.4 Struktur Pelaksana Penyusunan RKP Tahun 2021 .....	3
1.5 Uraian Tugas Tim Penyusunan RKP Tahun 2021 .....	4
1.6 Mekanisme Kerja .....	6
BAB II    TATA CARA PENULISAN .....	8
2.1 <i>Outline</i> Penulisan.....	8
2.2 Standar Penulisan .....	12
BAB III    PENANGGUNG JAWAB DAN TIM BACA BAB/SUBBAB .....	20
BAB IV    PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KOORDINASI PUSAT- DAERAH DAN PUSAT-PUSAT.....	23
BAB V    PENUTUP .....	28
LAMPIRAN .....	29

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah perlu menyusun RKP. RKP memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Tema RKP Tahun 2021 yaitu, “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Penyusunan RKP Tahun 2021 merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang Didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.

RKP Tahun 2021 berisi 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang sesuai dengan tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi



Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara garis besar, RKP Tahun 2021 berisikan Pendahuluan, Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional, Tema dan Sasaran Pembangunan, Prioritas Nasional dan Pendanaannya, Kaidah Pelaksanaan, Penutup, dan Lampiran. Lampiran RKP Tahun 2021 terdiri atas Matriks Pembangunan Prioritas Nasional, Matriks *Major Project*, dan Peta Pengembangan Kewilayahan.

Penyusunan RKP Tahun 2021 memerlukan koherensi antarbab serta akurasi data dan informasi baik mengenai capaian pembangunan maupun target pembangunan Indonesia. Untuk itu, kelengkapan data terutama target yang akan dicapai agar dapat dipastikan ketersediaannya pada saat melaporkan realisasi capaian tahun berjalan. Diharapkan pada penyusunan RKP Tahun 2021, semua data dan informasi sudah merupakan hasil koordinasi baik dengan sektor terkait di Bappenas maupun dengan instansi terkait.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan panduan secara jelas, benar dan pasti mengenai pelaksanaan penyusunan RKP Tahun 2021. Adapun tujuan dari penyusunan Pedoman ini adalah:

1. memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses penyusunan RKP Tahun 2021 dari awal sampai dengan berakhirnya kegiatan;
2. menjamin kelancaran dalam setiap tahap pelaksanaan dan kemudahan dalam pengawasan;
3. mempertegas tanggung jawab pelaksana tugas pada setiap tahapan kegiatan; serta

4. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta pelaporan dan pendokumentasian terhadap pencapaian tugas.

### 1.3 Ruang Lingkup

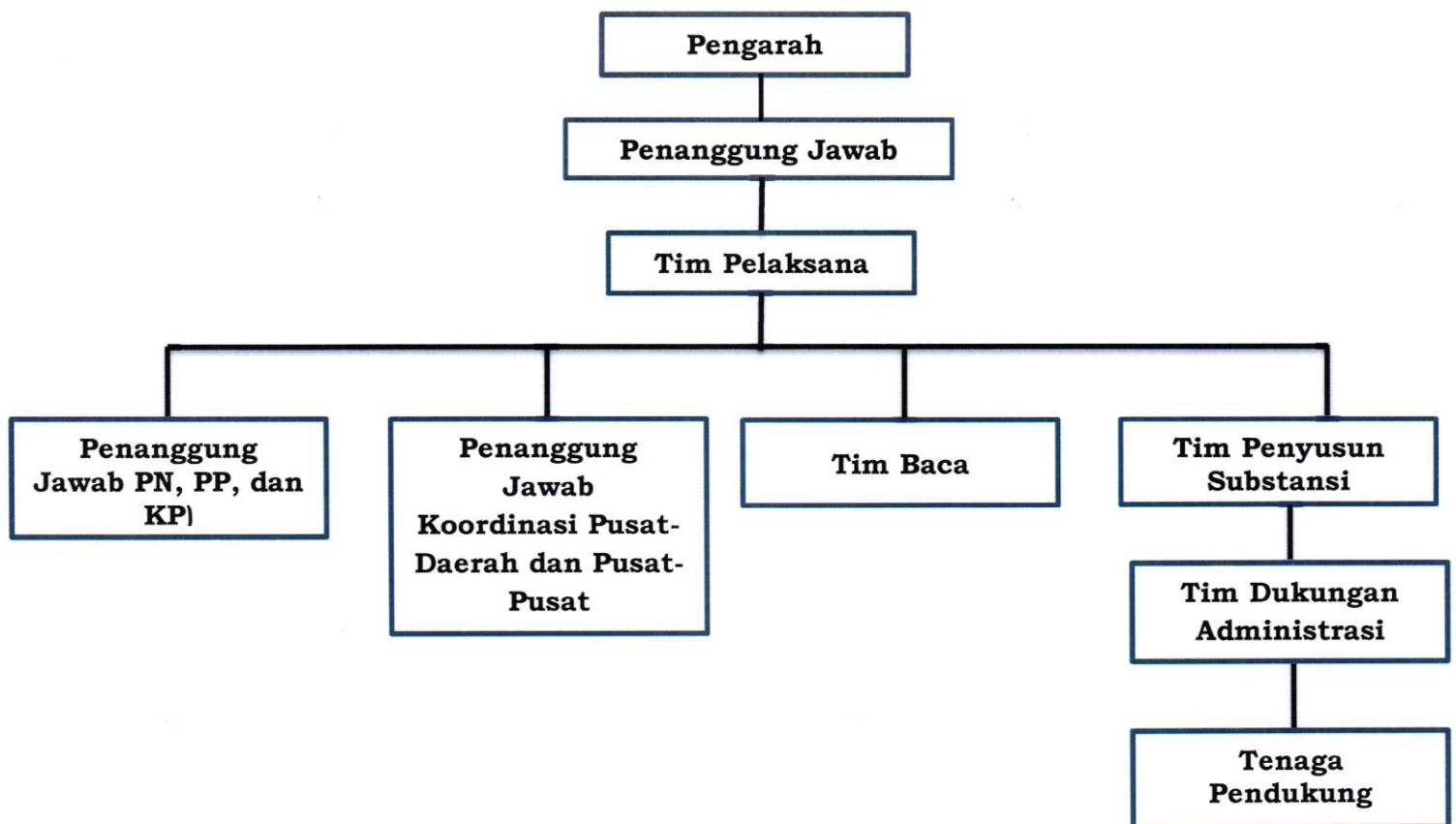
Ruang lingkup Pedoman penyusunan RKP Tahun 2021 ini meliputi proses persiapan, pengumpulan data, penulisan naskah, pencetakan, dan pendistribusian.

### 1.4 Struktur Pelaksana Penyusunan RKP Tahun 2021

Pengorganisasian pelaksanaan penyusunan RKP Tahun 2021 terdiri atas 1) Pengarah, 2) Penanggung Jawab, 3) Tim Pelaksana yang terdiri atas a) Penanggung Jawab PN, PP, dan KP, b) Penanggung Jawab Koordinasi Pusat-Daerah dan Pusat-Pusat, c) Tim Baca, dan d) Tim Penyusun Substansi yang terdiri atas (1) Tim Dukungan Administrasi dan (2) Tenaga Pendukung, dengan struktur dan uraian tugas, sebagai berikut:

**Gambar 1**

**Struktur Organisasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021**



### **1.5 Uraian Tugas Tim Penyusunan RKP Tahun 2021**

1. Pengarah bertugas:
  - a. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan; dan
  - b. memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
2. Penanggung Jawab bertugas:
  - a. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan arahan dari Pengarah; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
3. Tim Pelaksana bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RKP Tahun 2021;
  - b. memastikan penyusunan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial;
  - c. melakukan penulisan substansi Bab (narasi dan matriks) dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas pada RKP 2021; dan
  - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab kegiatan.
4. Tim Baca bertugas:
  - a. menjaga konsistensi dan keselarasan antar bab dalam RKP Tahun 2021;
  - b. menyusun rancangan pidato Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait RKP;
5. Tim Penyusun Substansi bertugas:
  - a. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan, format, dan mekanisme penulisan substansi RKP tahun 2021;

- b. melaksanakan teknis finalisasi penulisan RKP Tahun 2021 (termasuk penajaman kualitas narasi dan penelaahan ketepatan hierarki); dan
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya.
6. Penanggung Jawab Koordinasi Pusat-Daerah dan Pusat-Pusat bertugas:
- a. sebagai penanggung jawab Rapat Koordinasi dengan Gubernur yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan gubernur;
  - b. sebagai penanggung jawab Rapat Koordinasi Teknis yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi teknis.
  - c. sebagai penanggung jawab Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Dunia Usaha (BUMN) yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Dunia Usaha (BUMN);
  - d. sebagai penanggung jawab Rakorbangpus yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi pembangunan pusat;
  - e. sebagai penanggung jawab Musrenbang Provinsi yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Provinsi; dan
  - f. sebagai penanggung jawab Musrenbang Nasional yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Nasional.
7. Tim Dukungan Administrasi bertugas:
- a. mengompilasi dan memformat bahan Rancangan RKP tahun 2021; dan
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan rapat paripurna di DPR.

8. Tenaga Pendukung bertugas membantu Tim Dukungan Administrasi dalam menyiapkan data dan administrasi yang diperlukan oleh Tim Penyusun RKP Tahun 2021.

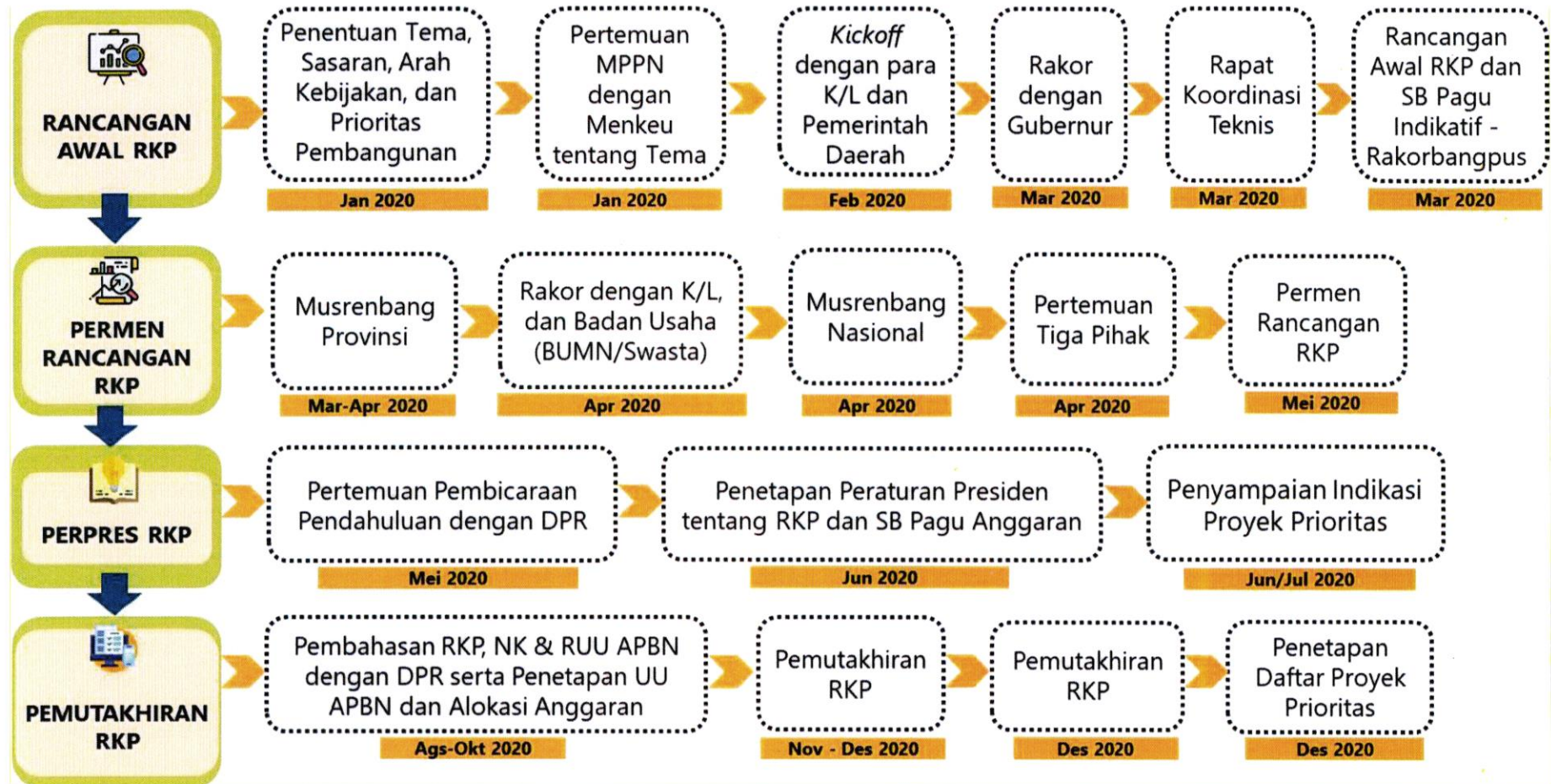
## **1.6 Mekanisme Kerja**

Proses penyusunan RKP Tahun 2021 dibagi ke dalam empat tahapan besar, yaitu Rancangan Awal RKP, Permen Rancangan RKP, Perpres RKP, dan Pmutakhiran RKP. Tahap Rancangan Awal RKP dimulai dari penentuan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan sampai dengan Penyelenggaraan Rakorbangpus. Tahapan Permen Rancangan RKP dimulai dari Musrenbang Provinsi, Musrenbang Nasional, sampai dengan penetapan Permen Rancangan RKP.

Tahapan Perpres RKP dimulai dari pertemuan pendahuluan dengan DPR sampai dengan Penetapan Perpres RKP. Tahapan Pmutakhiran RKP dimulai dengan pembahasan dengan DPR sampai dengan penetapan Permen Pmutakhiran, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.



**Gambar 2**  
**Agenda Penyusunan RKP 2021**



## **BAB II TATA CARA PENULISAN**

Kerangka penulisan RKP Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

### **2.1 Outline Penulisan**

Bab 1: Pendahuluan

Bab 2: Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional

2.1. Evaluasi RKP Tahun 2019

2.2. Kerangka Ekonomi Makro

2.3. Strategi Pengembangan Wilayah

2.4. Strategi Pendanaan Pembangunan

Bab 3: Tema dan Sasaran Pembangunan

3.1. RPJMN 2020-2024 dan Arah Presiden

3.2. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi  
Pembangunan

3.3. Prioritas Nasional

Bab 4: Prioritas Nasional dan Pendanaannya

4.1. Prioritas Nasional

4.1.1 PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk  
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

4.1.1.1 Pendahuluan

4.1.1.2 Sasaran Prioritas Nasional

4.1.1.3 Program Prioritas

4.1.1.4 Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project*

4.1.1.5 Kerangka Regulasi

4.1.1.6 Kerangka Kelembagaan

4.1.2 PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi  
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

4.1.2.1 Pendahuluan

4.1.2.2 Sasaran Prioritas Nasional

4.1.2.3 Program Prioritas

4.1.2.4 Proyek Prioritas Strategis/ *Major Project*

4.1.2.5 Kerangka Regulasi



4.1.2.6 Kerangka Kelembagaan

4.1.3 PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

4.1.4 PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

4.1.5 PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

4.1.6 PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

4.1.7 PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2 Pendanaan pada Prioritas Nasional

4.2.1 Alokasi per PN

4.2.2 Alokasi per *Major Project*

Bab 5: Kaidah Pelaksanaan

5.1 Kerangka Kelembagaan

5.2 Kerangka Regulasi

5.3 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian

Bab 6: Penutup

Lampiran 1. Matriks Pembangunan Prioritas Nasional

Lampiran 2. Matriks *Major Project*

Lampiran 3. Peta Pengembangan Kewilayahan

## 2.2 Kisi-kisi Bab dan Subbab

**Bab 1. Pendahuluan** terdiri atas latar belakang, tujuan, dan sistematika penulisan RKP Tahun 2021.

**Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional**

- a. Evaluasi RKP Tahun 2019 berisi hasil evaluasi Prioritas Nasional RKP Tahun 2019.
- b. Kerangka Ekonomi Makro terdiri atas perkembangan ekonomi terkini, perkiraan ekonomi tahun 2021, serta kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan.

- c. Strategi Pengembangan Wilayah Tahun 2021 terdiri atas tujuan dan sasaran pengembangan wilayah per pulau besar yaitu pulau Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- d. Strategi Pendanaan Pembangunan terdiri atas pemanfaatan belanja, dana transfer ke daerah dan dana desa (dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan D.I Yogyakarta, dana desa), serta sumber pendanaan dan pembiayaan lainnya (KPBU).

### **Bab 3. Tema dan Sasaran Pembangunan**

- a. RPJMN Tahun 2020-2024 berisi tema, sasaran jangka menengah, dan Arahkan Presiden.
- b. Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan berisi tema RKP Tahun 2021, sasaran dan indikator pembangunan, sasaran terpilih terkait tema pembangunan, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan berupa proyek prioritas strategis terkait tema pembangunan RKP Tahun 2021.
- c. Prioritas Nasional berisi uraian tujuh Prioritas Nasional yang sesuai dengan Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

### **Bab 4. Prioritas Nasional dan Pendanaannya**

- a. Prioritas Nasional, berisi penjabaran 7 (tujuh) PN yang meliputi:
  - 1) Pendahuluan berisi arah kebijakan dan isu strategis di tahun 2021.
  - 2) Sasaran Prioritas Nasional berisi rincian sasaran dan indikator pada level PN beserta target untuk tahun 2021 dan 2024 (dengan *baseline* tahun 2020).

- 3) Program Prioritas berisi narasi singkat Program Prioritas yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan PN serta dilengkapi dengan gambar struktur PN-PP (untuk KP dan Pro-P ditampung di dalam Matriks Pembangunan).
  - 4) Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* berisi *Major Project* dan *highlight* proyek yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
  - 5) Kerangka Regulasi berisi regulasi dan deregulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PN.
  - 6) Kerangka Kelembagaan berisi dukungan kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PN.
- b. Pendanaan pada Prioritas Nasional berisi alokasi pendanaan per-PN dan *Major Project*.

Contoh penulisan narasi untuk Bab 4 sebagaimana terlampir.

#### **Bab 5. Kaidah Pelaksanaan**

- a. Kerangka Kelembagaan berisi urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, prinsip-prinsip, sasaran dan arah kebijakan.
- b. Kerangka Regulasi berisi urgensi, alur pikir sinergi kebijakan dan regulasi, prinsip-prinsip, pengusulan, dan kebutuhan kerangka regulasi RKP Tahun 2021.
- c. Kerangka Evaluasi dan Pengendalian berisi tujuan, waktu pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi dan pengendalian RKP Tahun 2021.

**Bab 6. Penutup** berisi garis besar RKP Tahun 2021 dan harapan tentang pelaksanaan RKP Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024.

## Lampiran

- Lampiran 1. Matriks Pembangunan Prioritas Nasional, berisi tabel penjabaran target, alokasi pendanaan, dan K/L pelaksana PN, PP, KP, Pro-P, hingga Proyek.
- Lampiran 2. Matriks *Major Project*, berisi tabel penjabaran *Major Project*, manfaat, indikasi pendanaan, dan K/L pelaksana.
- Lampiran 3. Peta Pengembangan Kewilayahan, berisi sebaran lokasi rencana pelaksanaan *Major Project* dan proyek lainnya.

## 2.3 Standar Penulisan

Dalam upaya untuk menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penulisan RKP Tahun 2021, standar penulisan sebagai berikut ini:

1. Ukuran Kertas : A4

### Margin

- |       |           |
|-------|-----------|
| Atas  | : 1,8 cm  |
| Bawah | : 2,0 cm  |
| Kiri  | : 2,54 cm |
| Kanan | : 2,54 cm |

### Narasi

- |             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Font        | : Bookman Old Style            |
| Ukuran      | : 10                           |
| Spasi       | : 1,0                          |
| Antar spasi | : <i>Before 6pt, After 6pt</i> |

2. Penulisan Bab/Subbab/Subsubbab

- a. Judul Bab : Bab menggunakan nomor/angka dan Judul Bab ditulis dengan huruf kapital, *Center*  
Contoh:

BAB 4

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

- b. Subbab : Subbab menggunakan nomor/angka dan Judul Subbab ditulis dengan awal huruf kapital.

Contoh:

4.1 Prioritas Nasional Ketahanan Ekonomi  
untuk Pertumbuhan Berkualitas dan  
Berkeadilan

- c. Subsubbab : Subsubbab menggunakan nomor/angka dan Judul Subsubbab ditulis dengan awal huruf kapital.

Contoh:

4.1.1 Program Prioritas

### 3. Penulisan Narasi

Narasi ditulis dengan bahasa yang singkat dengan menggunakan bahasa yang lugas dan jelas dengan ketentuan:

a. Penggunaan Huruf Kapital

- 1) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jenis atau satuan ukuran.

Contoh: ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 sekolah.

- 2) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat.

Contoh: Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Suharso Monoarfa, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Tengah.

- 3) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa.

Contoh: bangsa Indonesia, suku Asmat, bahasa Sunda.

- 4) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi.

Contoh: Jawa Barat, Gunung Semeru, Pulau Kalimantan, Jalan Mahakam, Selat Lombok, Sungai Musi, Teluk Bayur.

- 5) Huruf kapital Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna) dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk.

Contoh: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

b. Penulisan Kata

1) Kata Berimbuhan

- a) Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya (antar-, kontra-, manca-, multi-, non-, pasca-, pra-, pro-, sub-, trans-). Apabila diikuti dengan kata yang diawali dengan huruf kapital atau singkatan, maka menggunakan tanda hubung (-).

Contoh: antarwilayah, kontraindikasi, mancanegara, multilateral, nonpangan, pascasarjana, prasekolah, proaktif, subbagian, transmigrasi, antar-K/L, non-BUMN, pro-Indonesia, anti-PKI.

- b) Kata atau gabungan yang mendapat awalan dan akhiran ditulis serangkai.

Contoh: pertanggungjawaban, menyebarluaskan, penyalahgunaan.

- c) Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran saja.

Contoh: bekerja sama, bertepuk tangan, sebarluaskan, garis bawahi.

- 2) Kata dalam bahasa asing ditulis miring.  
Contoh: Jumlah pusat pengembangan keahlian/ *skill development center* yang terbentuk sebanyak 20 lokasi.
- 3) Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai.  
Contoh: apalagi, barangkali, beasiswa, bilamana, dukacita, bermacam, kilometer, olahraga, radioaktif, saputangan, sukarela, wiraswasta.
- 4) Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah.  
Contoh: duta besar, orang tua, kerja sama, budi daya.
- 5) Singkatan dan Akronim
  - a) Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.  
Contoh: NKRI= Negara Kesatuan Republik Indonesia, PBB= Perserikatan Bangsa-Bangsa, PGRI= Persatuan Guru Republik Indonesia.
  - b) Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.  
Contoh: MAN= madrasah aliyah negeri, SD= sekolah dasar, KTP= kartu tanda penduduk, NIP= nomor induk pegawai.
  - c) Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.  
Contoh: BIG= Badan Informasi Geospasial, LIPI= Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LAN= Lembaga Administrasi Negara.
  - d) Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital.



Contoh: Bulog= Badan Urusan Logistik, Bappenas= Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kalteng= Kalimantan Tengah.

- e) Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil.

Contoh: iptek= ilmu pengetahuan dan teknologi, pemilu= pemilihan umum, puskesmas= pusat kesehatan masyarakat, rapim= rapat pimpinan.

6) Angka dan Bilangan

- a) Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian.

Contoh:

- i. Membangun sembilan desa; atau
- ii. Hasil pembangunan meliputi 5 gedung sekolah, 4 laboratorium, dan 10 perpustakaan.

- b) Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf.

Contoh: Lima belas gedung sekolah baru telah terbangun hingga triwulan ke-I.

- c) Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca.

Contoh: Proyek prioritas pembangunan jalan tol memerlukan biaya Rp10 triliun.

- d) Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang.

Contoh: 4 hektare, 1 tahun 6 bulan, Rp5.000,00, US\$3,50.

- e) Penulisan angka desimal menggunakan 2 digit di belakang koma.

Contoh: Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,32 persen.

f) Penulisan bilangan tingkat.

Contoh: abad XX, abad ke-20, Perang Dunia II, Perang Dunia Ke-2.

g) Penulisan angka yang mendapat akhiran -an.

Contoh: tahun 1950-an, uang 5.000-an.

7) Penulisan Perundang-Undangan

Contoh: PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Perpres No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

c. Pemakaian Tanda Baca

1) Tanda Titik Koma (;)

Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian berupa kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.

Contoh:

Arah kebijakan dalam rangka pembangunan kesehatan tahun 2019 yaitu:

- a) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
- b) mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
- c) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan
- d) meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

2) Tanda Persen (%)

Penulisan tanda % dalam teks ditulis 'persen', sedangkan penggunaan pada tabel atau gambar menggunakan simbol.

Contoh: Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen.

4. Tabel

Jika dalam suatu pembahasan ada format dalam bentuk tabel, cara penulisan tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Font judul tabel yaitu Bookman Old Style 10 dengan cetak tebal dan spasi tunggal
- b. Font isi tabel Bookman Old Style 9 spasi tunggal
- c. Penomoran tabel: **Tabel x.y** dengan **x**: nomor bab/subbab setiap ganti bab/subbab **y** dimulai dari 1
- d. Judul: singkat dan jelas, bold, kata diawali dengan huruf kapital
- e. Isi tabel harus menjadi acuan di dalam narasi
- f. Angka desimal 2 digit di belakang koma
- g. Tabel memuat data 2019 (*baseline*), 2020, 2021, dan 2024
- h. Font sumber tabel Bookman Old Style 8

**Tabel x.y**  
**Sasaran dan Indikator .....**  
**Tahun 2020, 2021, dan 2024**

No.	Sasaran/Indikator	2019 ( <i>baseline</i> )	Tabel		
			2020	2021	2024
1	Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, tertinggal				
	Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)				
2	Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, tertinggal				
	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)				

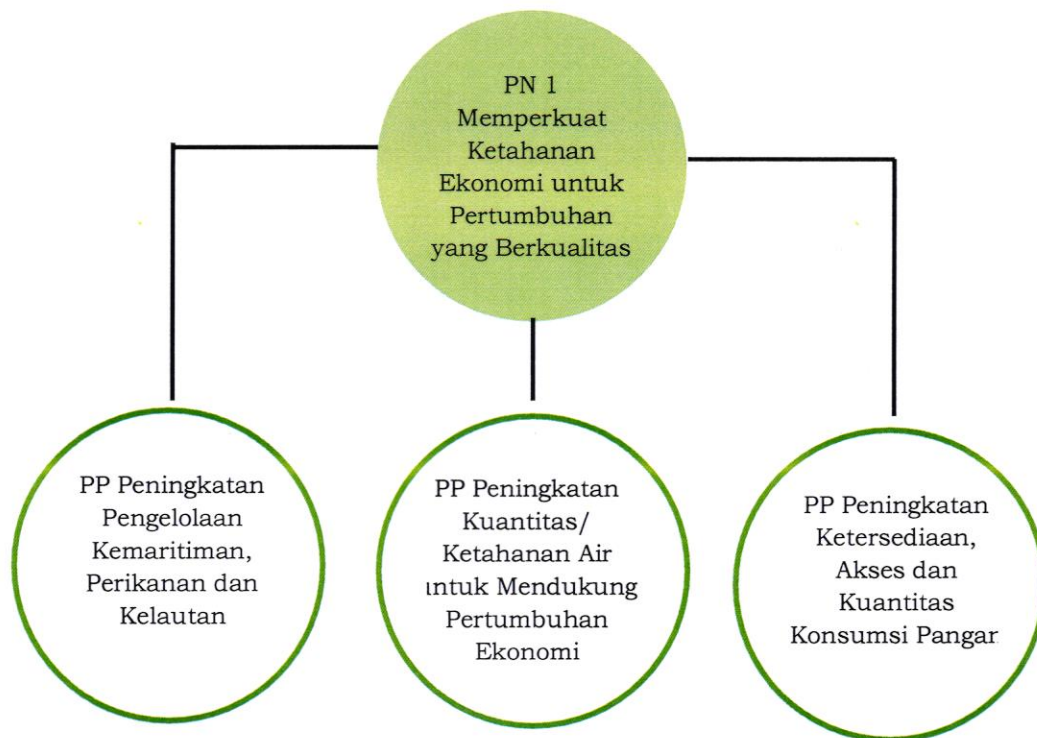
Sumber : BPS, 2020

## 5. Gambar

- a. Font judul gambar Bookman Old Style 10 dengan cetak tebal dan spasi tunggal
- b. Font dalam gambar Bookman Old Style 9 spasi tunggal
- c. Penomoran gambar: **Gambar x.y** dengan **x**: nomor bab/subbab setiap ganti bab/subbab **y** dimulai dari 1

- d. Judul: singkat dan jelas, bold, kata diawali dengan huruf kapital
- e. Isi gambar harus menjadi acuan di dalam narasi
- f. Angka desimal, 2 digit di belakang koma
- g. Font sumber gambar Bookman Old Style 8

**Gambar x.y**  
**Kerangka Prioritas Nasional .....**  
**Tahun 2021**



Sumber: Bappenas, 2020

### BAB III PENANGGUNG JAWAB DAN TIM BACA BAB/SUBBAB

Bab/Subbab	Penanggung Jawab	Tim Baca
<b>BAB 1. Pendahuluan</b>	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
<b>BAB 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</b>		
2.1. Evaluasi RKP Tahun 2019	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan
2.2. Kerangka Ekonomi Makro	Deputi Bidang Ekonomi	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan
2.3. Strategi Pengembangan Wilayah	Deputi Bidang Pengembangan Regional	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
2.4. Strategi Pendanaan Pembangunan	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan
<b>BAB 3. Tema dan Sasaran Pembangunan</b>		
3.1. RPJMN 2020-2024 dan Arah Presiden	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
3.2. Tema, Sasaran, dan Strategi Pembangunan	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
3.3. Prioritas Nasional	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
<b>BAB 4. Prioritas Nasional dan Pendanaannya</b>		
4.1. Prioritas Nasional (PN)		
4.1.1. PN1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan	Deputi Bidang Ekonomi	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan

yang Berkualitas dan Berkeadilan		
4.1.2. PN2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Deputi Bidang Pengembangan Regional 2. Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
4.1.3. PN3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan 2. Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
4.1.4. PN4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
4.1.5. PN5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur
4.1.6. PN6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur
4.1.7. PN7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan



4.2. Pendanaan pada Prioritas Nasional		
4.2.1. Alokasi per PN	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan
4.2.2. Alokasi per <i>Major Project</i>	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan
<b>BAB 5. Kaidah Pelaksanaan</b>		
5.1. Kerangka Kelembagaan	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
5.2. Kerangka Regulasi	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
5.3. Kerangka Evaluasi dan Pengendalian	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan
<b>BAB 6. Penutup</b>	Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
<b>LAMPIRAN</b>		
Lampiran 1. Matriks Pembangunan Prioritas Nasional	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Lampiran 2. Matriks <i>Major Project</i>	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur
Lampiran 3. Peta Pengembangan Kewilayahan	Deputi Bidang Pengembangan Regional	Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan



#### **BAB IV PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KOORDINASI PUSAT-DAERAH DAN PUSAT-PUSAT**

1. *Kick Off* Penyusunan RKP Tahun 2021

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.
- Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Tujuan : Menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, agenda penyusunan RKP, serta penyampaian *Major Project* sebagai bahan persiapan Rapat Koordinasi dengan Gubernur.
- Output* : Tersosialisasikannya tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, agenda penyusunan RKP, serta persiapan Rapat Koordinasi dengan Gubernur.
- Peserta : Kementerian PPN/Bappenas, Seluruh Kementerian/ Lembaga, dan Bappeda Provinsi.
- Mekanisme : Disesuaikan dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional.

2. Rapat Koordinasi dengan Gubernur

- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Ketua Pelaksana : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan.
- Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Tujuan : Membahas rencana pelaksanaan *Major Project* dan proyek lainnya dalam RPJMN di daerah.
- Output* : Tiga usulan dari daerah berupa rencana pelaksanaan *Major Project* dan proyek lainnya di daerah.

- Peserta : Kementerian PPN/Bappenas dan Seluruh Gubernur.
- Mekanisme : Disesuaikan dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Pengembangan Regional.
3. Rapat Koordinasi dengan K/L dan Dunia Usaha (BUMN)
- Penanggung Jawab : Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Ketua Pelaksana : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan.
- Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Tujuan : Membahas dukungan BUMN, swasta dan pihak terkait lainnya dalam pencapaian prioritas nasional khususnya *Major Project*.
- Output* : Dukungan BUMN, swasta, dan pihak terkait dalam pencapaian prioritas nasional khususnya *Major Project*.
- Peserta : Kementerian PPN/Bappenas, Seluruh K/L terkait, dan Dunia Usaha (BUMN/Swasta), dan Instansi terkait lainnya.
- Mekanisme : Disesuaikan dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan.
4. Rapat Koordinasi Teknis
- Penanggung Jawab : Deputy Bidang Pengembangan Regional.
- Ketua Pelaksana : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan.
- Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Tujuan : Membahas secara teknis rencana pelaksanaan *Major Project* dan proyek lainnya serta kesiapan Daerah dalam mendukung *Major Project*

berdasarkan hasil Rakor Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Gubernur.

*Output* : Rencana pelaksanaan *Major Project* dan proyek lainnya serta kesiapan Daerah dalam mendukung *Major Project* berdasarkan hasil Rakor Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Gubernur.

Peserta : Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga.

Mekanisme : Disesuaikan dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Pengembangan Regional.

5. Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat

Penanggung Jawab : Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.

Tujuan : Menyampaikan rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif.

*Output* : Tersosialisasikannya rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif.

Peserta : Kementerian PPN/Bappenas, Seluruh K/L, dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Mekanisme : Disesuaikan dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Deputy Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

6. Musrenbang Provinsi

Penanggung Jawab : Deputy Bidang Pengembangan Regional.

Ketua Pelaksana : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.

Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

- Tujuan : a. Menyampaikan Tema, Arah Kebijakan RKP, Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi dan Arah Pengembangan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Menampung usulan kegiatan dari pemerintah daerah untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional sebagai bahan pembahasan Musrenbang Nasional, dan sinkronisasi kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung Prioritas Nasional.
- Output : a. Tersosialisasikannya Tema, Arah Kebijakan RKP, Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi dan Arah Pengembangan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Daftar usulan kegiatan dari pemerintah daerah sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Nasional.
- Peserta : Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pejabat Eselon I Bappenas, *Liaison Officer* Provinsi, Penghubung Provinsi, Perwakilan Deputy Bidang Pengembangan Regional.
- Mekanisme : Disesuaikan dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Pengembangan Regional.
7. Musrenbang Nasional
- Penanggung Jawab : Deputy Bidang Pengembangan Regional.
- Ketua Pelaksana : Direktorat Otonomi Daerah.
- Wakil Ketua Pelaksana : Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

- Tujuan : Membahas rencana pelaksanaan *Major Project* dan proyek lainnya dalam rangka menyusun Rancangan RKP.
- Output* : Rencana pelaksanaan *Major Project* dan proyek lainnya dalam rangka menyusun Rancangan RKP.
- Peserta : Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, serta dapat melibatkan unsur masyarakat.
- Mekanisme : Disesuaikan dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional.

## **BAB V PENUTUP**

Pedoman ini merupakan panduan bagi seluruh penyelenggara penyusunan RKP Tahun 2021 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan disusunnya Pedoman ini, diharapkan proses penyusunan RKP Tahun 2021 dapat terlaksana secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional** 



**Himawan Hariyoga**

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN NOMOR 2 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH TAHUN 2021**

**CONTOH PENULISAN NARASI BAB 4**

**BAB 4. PRIORITAS NASIONAL DAN PENDANAANNYA**

**4.1. PRIORITAS NASIONAL**

**4.1.1. PN 1. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK  
PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN**

**4.1.1.1. Pendahuluan** (*Memuat pengantar dan isu yang menonjol di tahun 2021 - maksimal ½ halaman*)

Contoh:

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Dan seterusnya .....

Beberapa yang dihadapi tahun 2021 adalah defisit perdagangan sebesar xxx, ekspor yang melambat, deindustrialisasi dsb .... ***(diupayakan dalam isu yang konkret bukan isu jangka menengah)***

**4.1.1.2. Sasaran Prioritas Nasional** (*Berisi tabel sasaran, indikator dan target PN terpilih sesuai dengan tema/isu yang dihadapi/Major Project. Mencakup sasaran dan target yang dicapai baik oleh Kementerian/Lembaga maupun instansi pelaksana*)



*lainnya Pemerintah Daerah/ BUMN/ Swasta maksimal 1,5 halaman)*

Catatan: untuk indikator keseluruhan RPJMN dapat ditampilkan di Matriks Pembangunan.

Contoh:

(Pengantar) Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**

**Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 1**

Sasaran/Indikator	2019 (baseline)	Target		
		2020	2021	2024
1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan				
1.1. ....				
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian				
2.1. ....				

**Tabel 2.2.**

**Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Nasional 6**

Sasaran/Indikator	2019 (baseline)	Target		
		2020	2021	2024
1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
1.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				
2. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim				

Sasaran/Indikator	2019 (baseline)	Target		
		2020	2021	2024
2.1. Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB				
3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap <i>baseline</i>				
3.1. Persentase penurunan emisi GRK				
3.2. Persentase penurunan intensitas emisi GRK				

**Catatan:**

Sasaran dan Indikator PN dapat diambil dari Sasaran Agenda Pembangunan dalam Narasi RPJMN 2020-2024 dan akan dilaksanakan pada tahun 2021.

**4.1.1.3. Program Prioritas** (*Berisi narasi singkat penjelasan pencapaian sasaran Prioritas Nasional melalui Program Prioritas - maksimal 1 Halaman*)

**Contoh:**

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan akan dilakukan melalui delapan program prioritas.

Gambar 1.1.

Kerangka PN 1 Tahun 2021



Tabel 2.3.

Sasaran, Indikator, dan Target Program Prioritas

Sasaran/Indikator	2019 (baseline)	Target		
		2020	2021	2024
1. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi				
1.1. Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a)) (%)	3,9	4,5	5,5	8,1
1.2. Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*) (%)	19,9	20,1	20,3	21,0
1.3. Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (%)	4,8	4,9	5,1	5,5
.....				
1.11. Indikator xxx		xxx	xxx	xxx
2. Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)				
2.1. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	-3,6	1,0	3,5	10,1



Sasaran/Indikator	2019 (baseline)	Target		
		2020	2021	2024
2.2. Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	16,3	17,0	18,5	22,3
.....				
2.3.				
<b>8. (Sasaran ..... )</b>				
8.1. ....				
8.2. ....				
8.3. ....				
8.4. ....				

**Catatan:**

- ✓ Sasaran dan Indikator PN dapat diambil dari Sasaran dan Indikator PP terpenting yang terdapat dalam Narasi RPJMN 2020-2024 dan akan dilaksanakan pada tahun 2021.
- ✓ Sasaran menggunakan kalimat sasaran, seperti: “Meningkatnya ...” “Menurunnya ...” “Menguatnya ...”

**4.1.1.4. Proyek Prioritas Strategis/Major Project** *(Berisi penjelasan ringkas masing-masing major project di dalam PN terkait, termasuk gambaran integrasi pelaksanaan dan pendanaannya. Penjelasan per Major Project dapat dalam bentuk infografis - maksimal 1 halaman/Major Project)*

**Contoh:**

Di dalam PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan telah disusun 7 Proyek Prioritas Strategis *(Major Project)* sebagai langkah konkret pencapaian sasaran

yang dirinci hingga target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Pendanaan *Major Project* mensinergikan berbagai sumber pendanaan. Tujuh *Major Project* tersebut adalah:

***Major Project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas:***

Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai

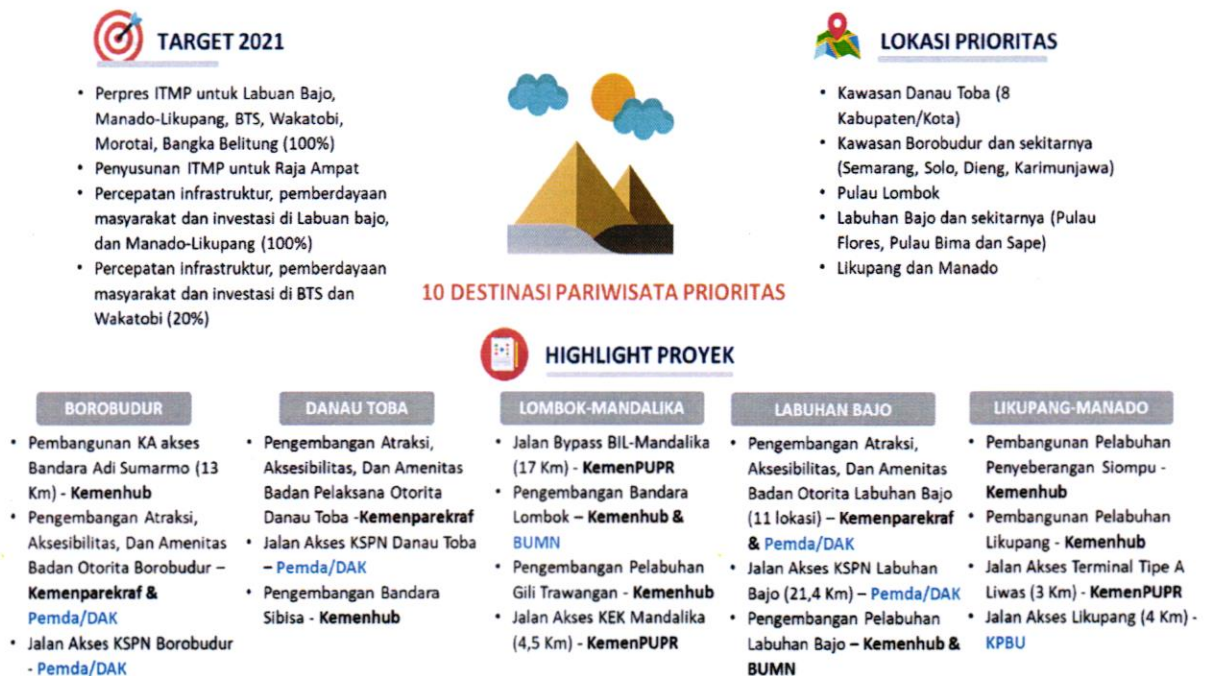
***(memuat target, highlight proyek dan pelaksana (K/L, Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta) serta lokus tahun 2021, dapat dalam bentuk infografis)***

Contoh:

Untuk mewujudkan sasaran 10 destinasi pariwisata prioritas, akan dicapai diantaranya melalui pembangunan amenitas dan atraksi wisata, pembangunan jalan akses ke lokasi pariwisata dst...

Gambar 1.2.

**Major Project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas**



Gambar 1.3.

**Major Project 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter**

Gambar 1.4.

**Major Project...dst**

**4.1.1.5. Kerangka Regulasi (Jika dibutuhkan)**

Berisi Regulasi dan Deregulasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran PN. (maksimal ½ halaman)

**Contoh:**

Revisi Perpres No. ... tahun ... tentang percepatan ekonomi ....

Dst...

**4.1.1.6. Kerangka Kelembagaan (Jika dibutuhkan)**

Berisi dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan PN ini (maksimal ½ halaman).

**Contoh:**

Pembentukan Badan Otorita ...

Dst...

**4.1.2. PN 2 MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN**

**4.1.3. PN 3 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING**

**4.1.3.1. Pendahuluan** (*Memuat pengantar dan isu yang menonjol di tahun 2021. Diupayakan dalam isu yang konkret bukan isu jangka menengah - maksimal ½ halaman*)

**4.1.3.2. Sasaran Prioritas Nasional** (*Berisi tabel sasaran, indikator dan target PN terpilih sesuai dengan tema/isu yang dihadapi/Major Project - maksimal 1,5 halaman*)

**Catatan:** untuk indikator keseluruhan RPJMN dapat ditampilkan di Matriks Pembangunan

**4.1.3.3. Program Prioritas** (*Berisi narasi singkat penjelasan pencapaian sasaran Prioritas Nasional melalui Program Prioritas - maksimal 1 Halaman*)

**4.1.3.4. Proyek Prioritas Strategis/Major Project** (*Berisi penjelasan ringkas masing-masing major project di dalam PN terkait. Penjelasan per Major Project dapat dalam bentuk infografis - maksimal 1 halaman/Major Project*)

**Contoh:**

Di dalam PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing telah disusun 4 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) sebagai langkah konkret pencapaian sasaran yang dirinci



hingga target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Pendanaan *Major Project* mensinergikan berbagai sumber pendanaan. Empat *Major Project* tersebut adalah:

***Major Project Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting***

***(memuat target, highlight proyek dan pelaksana (K/L, Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta) serta lokus tahun 2021, dapat dalam bentuk infografis)***

Contoh:

Untuk mencapai sasaran percepatan penurunan stunting menjadi 21,1% dan angka kematian ibu dari 230 menjadi 217/100.000 akan dilaksanakan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif diantaranya melalui penyediaan imunisasi dasar lengkap dan suplementasi gizi mikro; pembangunan SPAM dan pembangunan SPAL, dst ...

Gambar 1.5.

**Major Project xx Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting**



Gambar 1.6.

**Major Project 9 Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)**

Gambar 1.7.

**Major Project...dst**

**4.1.3.5. Kerangka Regulasi (Jika dibutuhkan)**

Berisi Regulasi dan Deregulasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran PN. (maksimal ½ halaman)

**Contoh:**

Revisi Perpres No. ... tahun ... tentang percepatan ekonomi ....

Dst...

**4.1.3.6. Kerangka Kelembagaan (Jika dibutuhkan)**

Berisi dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan PN ini (maksimal ½ halaman).

**Contoh:**

Pembentukan Badan Otorita ...

Dst...

#### 4.2. PENDANAAN PADA PRIORITAS NASIONAL

Berisi alokasi per PN dan per *Major Project* (diisi oleh Kedeputian Pendanaan)

PP/KP/ProP/ PROYEK K/L	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2019 (baseline)	INDIKASI TARGET			Rp. MILIAR (TAHUN 2021)	LOKASI	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	MAJOR PROJECT	INSTANSI PELAKSANA
				2020	2021	2024					
PP : Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Meningkatnya nilai tambah lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Kontribusi PDB pariwisata (Persen)		5,0	5,0	5,0					
KP : Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata	Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya (Destinasi)		10 (kumulatif)	10 (kumulatif)	10 (kumulatif)					
ProP : Pengembangan 25 Kawasan Hutan Prioritas untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	Tertanganinya pengembangan kawasan hutan prioritas	Jumlah Kawasan hutan prioritas		25	25	25			Pembangunan Infrastruktur, Transformasi Ekonomi		
Proyek K/L: Pengembangan Ekowisata dan Wisata Bahari pada Kawasan Konservasi (Bahari: TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate)	Tertanganinya pengembangan ekowisata dan wisata bahari	Jumlah Taman Nasional Laut		3	3	3	445,0	Sulawesi	Transformasi Ekonomi		KLHK, KKP

**Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/**

**Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,** 



**Himawan Hariyoga**